

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah utama yang ingin dituntaskan oleh berbagai negara di seluruh dunia. Negara Indonesia yang merupakan negara berkembang memiliki fokus untuk menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Pengentasan kemiskinan akan menjadi salah satu indikator penting dari keberhasilan pembangunan (Azmi, 2019).

Menurut Perpres Nomor 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, pemahaman mengenai “kemiskinan” mestilah beranjak dari pendekatan berbasis hak (*right based approach*). Dalam pemahaman harus diakui bahwa seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak-hak yang sama. Oleh karena itu, apabila ada kondisi seseorang atau sekelompok laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat maka disebut dengan kemiskinan (Dwihapsari, 2017).

Kemiskinan tidak hanya menjadi permasalahan bagi negara berkembang, bahkan negara-negara maju pun mengalami kemiskinan walaupun tidak sebesar Negara Berkembang. Persoalannya sama namun dimensinya berbeda. Persoalan kemiskinan di negara maju merupakan bagian terkecil dalam komponen masyarakat mereka tetapi bagi negara berkembang persoalan

menjadi lebih kompleks karena jumlah penduduk miskin hampir mencapai setengah dari jumlah penduduk. Bahkan ada negara- negara sangat miskin mempunyai jumlah penduduk miskin melebihi dua pertiga dari penduduknya (Azmi, 2019).

Kemiskinan disamping pengangguran dan ketimpangan merupakan masalah klasik yang besar dan mendasar bagi sebagian besar negara sedang berkembang termasuk di Indonesia. Berbagai indikator dan parameter untuk mengukur tingkat kemiskinan dan menghitung jumlah penduduk miskin yang telah menjadi permasalahan di kehidupan masyarakat. Sementara itu, kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yakni antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan dan kelompok masyarakat relatif yang lebih kaya (Rosyidi, 2012).

Pengukuran tingkat kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penting diketahui untuk menunjukkan bagaimana kemajuan ekonomi dapat meningkatkan standar kehidupan dan kesejahteraan masyarakat serta bagaimana berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah berdampak terhadap masyarakat miskin (Fatma, 2005).

Faktor pertama yang mempengaruhi persentase kemiskinan adalah jumlah penduduk yang besar apabila diikuti dengan kualitas yang memadai merupakan modal pembangunan yang handal, namun apabila kualitas rendah justru akan menjadi beban pembangunan. Mereka tidak mempunyai lahan atau alat produksi sendiri biasanya merupakan korban pertama dari langkah-langkah

penghematan anggaran pemerintah. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan juga bagus digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi antar daerah (Tambunan, 2003).

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan, salah satunya adalah pengendalian laju inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang secara keseluruhan dan terus menerus. Jika yang naik hanya satu barang saja tidak bisa disebut inflasi kecuali kenaikan harga barang tersebut mempengaruhi harga barang lain. Dengan meningkatnya tingkat inflasi menyebabkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menurun, akibatnya tingkat kemiskinan semakin tinggi. Tingginya tingkat kemiskinan di suatu daerah menyebabkan daya beli masyarakat menjadi rendah. Hal ini terjadi karena pada umumnya pendapatan masyarakat yang rendah. Keadaan ini akan menjadi lebih parah lagi apabila diikuti pula dengan tingginya tingkat pengangguran. Saat ini pengangguran bukan hanya menjadi masalah ekonomi, melainkan juga menjadi masalah sosial dan politik. Dampak sosial yang ditimbulkan dari pengangguran yang tinggi dapat meningkatkan tingkat kriminalitas, baik berupa perampokan, pencurian maupun perdagangan ilegal. Hal ini dapat terjadi karena tuntutan kebutuhan hidup masyarakat yang harus dipenuhi, minimal kebutuhan pokok (Primandari, 2018).

Menurut Yaqoub (2012) bahwa upaya menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan adalah sama pentingnya. Secara teori, jika masyarakat

tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan ada miskin. Sehingga dikatakan dengan tingkat pengangguran rendah maka tingkat kemiskinan juga rendah.

Faktor yang mempengaruhi perluasan kesempatan kerja antara lain: perkembangan jumlah penduduk dan angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan kebijaksanaan mengenai perluasan kesempatan kerja itu sendiri. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting disamping sumber alam, modal dan teknologi. Tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan, sebagai pelaku pembangunan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang begitu nyata dan dekat dengan lingkungan, bahkan masalah ketenagakerjaan dapat menimbulkan masalah baru baik di bidang ekonomi maupun non-ekonomi. Tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan rendahnya pendapatan yang selanjutnya memicu munculnya kemiskinan (Yaqoub, 2012).

Tabel 1.1.
Jumlah Penduduk Miskin, Pengangguran, dan Inflasi
Di Provinsi Maluku Utara 2005-2020

Tahun	Penduduk Miskin (%)	Pengangguran (%)	Inflasi (%)
2005	2,0	13,79	4,82
2006	-2,0	6,90	5,12
2007	-6,0	6,05	10,13
2008	-2,0	4,89	11,25
2009	-9,0	6,79	3,88
2010	9,42	6,03	5,32
2011	9,18	5,34	4,52
2012	8,47	4,82	3,28
2013	7,50	3,80	9,62
2014	7,30	5,29	9,05
2015	6,84	5,29	4,47
2016	6,33	4,01	1,89
2017	6,35	5,33	1,99
2018	6,64	4,63	4,05
2019	6,77	4,81	2,02
2020	6,97	5,15	2,13

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2005-2020

Berdasarkan data pada tabel 1.1 jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara mencapai 9,42 persen di tahun 2010, sementara jumlah pengangguran di tahun 2010 mencapai 6,03 persen. Teori mengatakan jika tingkat pengangguran naik maka akan memicu jumlah kemiskinan bertambah. Namun, jumlah data tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan. Memasuki tahun 2011 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 9,18 persen, tetapi jumlah pengangguran mengalami penurunan pada tahun 2011 sebanyak 5,34 persen, tahun 2015 jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 6,84 persen, namun jumlah pengangguran meningkat sebanyak 5,29 persen, di tahun 2019 jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 6,77 persen, namun jumlah pengangguran menurun sebanyak 4,81 persen dan pada tahun 2020 penduduk miskin mengalami peningkatan sebanyak 6,97 persen, sementara pengangguran juga mengalami kenaikan sebanyak 5,15 persen. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa data cenderung fluktuatif.

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa inflasi pada tahun 2010-2020 mengalami fluktuasi, yaitu bergerak dari 5,32 persen di tahun 2010; menurun menjadi 3,28 persen di tahun 2012; kemudian naik dengan signifikan menjadi 9,62 persen di tahun 2013; dan 9,05 di tahun 2014. Kemudian, pada lima tahun terakhir yaitu tahun 2015-2019 tingkat inflasi kembali mengalami fluktuasi, yaitu bergerak dari 4,47 persen di tahun 2015; menurun menjadi 1,99 persen di tahun 2017; kemudian naik menjadi 4,05 persen di tahun 2018; pada tahun 2019 kembali menurun 2,02 persen, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 2,13 persen.

Berdasarkan data terbaru yang di rilis oleh BPS, yaitu data pertumbuhan ekonomi menurut provinsi di tahun 2020, Maluku Utara merupakan urutan pertama yang tumbuh sebesar 4,92 persen dari 34 Provinsi di Indonesia. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Maluku Utara pada tahun 2020 meningkat sebesar 86,37 ribu jiwa. Hal ini bertolak belakang dengan teori yang di kemukakan oleh (Siregar dan Wahyuniarti, 2008) dalam (Safuridar, 2017), menurutnya pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar di setiap golongan masyarakat, termasuk di golongan penduduk miskin.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku Utara?
2. Apakah inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah disebutkan diatas maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber informasi serta bahan kajian bagi penelitian selanjutnya khususnya tentang bagaimana "*Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Maluku Utara*"
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan pertimbangan bagi pemerintah di Provinsi Maluku Utara dalam membuat kebijakan

dan merumuskan strategi dalam mengatasi kemiskinan daerah diwaktu yang akan datang.

